

PERBANDINGAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM DAN KONVENSIONAL STUDI DI INDONESIA

Irbatus Syafa'ah¹, Rida Irmada², Syahroni Wahyu Pratama³

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 220721100197@student.trunojoyo.ac.id, 220721100009@student.trunojoyo.ac.id

220721100240@student.trunojoyo.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa kebijakan moneter Islam lebih efisien daripada kebijakan moneter konvensional karena dalam kebijakan moneter Islam, proses keuangan tidak melibatkan riba. Di sisi lain, dalam sistem kebijakan moneter konvensional, tidak adanya perhatian terhadap riba mengakibatkan praktik spekulasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi. Perbedaan utamanya terletak pada prinsip-prinsip etika dan nilai yang menjadi landasan bagi kebijakan moneter dalam kedua sistem tersebut.

Kata Kunci: *moneter, kebijakan moneter islam, perbandingan, kebijakan moneter konvensional.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mengulas topik ekonomi moneter yang meliputi perbandingan antara kebijakan moneter Islam dan konvensional di Indonesia. Hal ini mencakup analisis mata uang dan aspek moneter dalam perspektif keuangan Islam, penelusuran kebijakan moneter pada zaman Rasulullah, instrumen-instrumen moneter dalam konteks Islam, prinsip-prinsip mendasar dalam kebijakan moneter Islam, konsep-konsep ekonomi moneter Islam, serta strategi dalam kebijakan moneter Islam. Di sisi lain, aspek kebijakan moneter konvensional melibatkan pembahasan tentang sistem riba, struktur perbankan, serta praktik spekulasi yang memungkinkan pembuatan uang tunai dan giral, dan pengalihan uang dalam sektor moneter untuk mencapai profit tanpa risiko.

Jika jumlah uang beredar di Indonesia meningkat secara signifikan, ini bisa mengakibatkan peningkatan harga yang melebihi prediksi yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah uang beredar rendah, ini bisa menyebabkan stagnasi ekonomi. Jika situasi ini terus berlanjut, akan terjadi penurunan keseluruhan kemakmuran masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang upaya pemerintah atau otoritas moneter untuk mengendalikan banyaknya uang dalam peredaran, yang dikenal sebagai kebijakan moneter.¹

Perbedaan antara instrumen moneter dalam konteks Islam dan konvensional dapat diidentifikasi dari dua aspek utama. Pertama, tujuan penerapannya; kedua, mekanisme alat yang digunakan dalam pelaksanaannya. Perbedaan pertama terletak pada fokus ekonomi Islam yang bertujuan menjaga aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dikenal sebagai maqasid syariah, sedangkan dalam instrumen moneter konvensional,

¹ Perry warjiyoyo dan solikin, *Kebijakan Moneter Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2017) hlm1.

tujuannya hanya terbatas pada menjaga harta semata. Perbedaan kedua, dalam ekonomi konvensional, instrumen bunga digunakan sebagai mekanisme alat, sementara dalam Islam, digunakan mekanisme modal bersama atau bagi hasil. Meskipun demikian, otoritas moneter dalam sistem moneter Islam, seperti bank sentral dan pemerintah, tidak berbeda jauh dengan sistem konvensional. Bunga sesungguhnya menjadi akar permasalahan yang menghasilkan ketidakstabilan dalam perekonomian.

Instrumen pengaturan moneter dalam ekonomi konvensional telah terbukti kurang efektif dan kurang konsisten jika dibandingkan dengan perangkat regulasi dalam konteks ekonomi Islam. Implementasi instrumen moneter syariah bersamaan dengan instrumen moneter konvensional mempunyai pengaruh yang signifikan waspada pengendalian inflasi (stabilitas harga) di Indonesia. Namun, belum ada kepastian mengenai dampak dari beberapa instrumen keuangan syariah terhadap pengendalian inflasi.²

Pendahuluan menggambarkan latar belakang atau alasan pentingnya masalah ini perlu diteliti, penelitian-penelitian terkait yang pernah ada, perbedaan dari penelitian sebelumnya sehingga memunculkan kebaruan penelitian, identifikasi masalah, tujuan untuk melaksanakan penelitian ini dan harapan akan hasil atau pemecahan masalah yang diperoleh.

KAJIAN PUSTAKA

Moneter

Moneter diambil dari istilah moneta yang merujuk pada "*uang*". Oleh karena itu, ekonomi moneter adalah bidang ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan keuangan serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan keuangan.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau lembaga keuangan pusat untuk mengendalikan suplai uang dalam upaya mencapai tujuan perkembangan ekonomi tertentu. Tujuan tersebut termasuk konsistensi ekonomi makro yang tercermin dalam kestabilan nilai uang (rendahnya tingkat inflasi), peningkatan pertumbuhan hasil ekonomi, dan ketersediaan pekerjaan yang memadai.

Kebijakan Moneter merujuk pada upaya mengelola situasi ekonomi makro agar sejalan dengan harapan melalui kontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah mengendalikan harga dan inflasi secara stabil serta meningkatkan produksi secara seimbang. Sebagian besar Sektor ekonomi kapitalis terhubung dengan sistem suku bunga, menyebabkan sektor moneter tumbuh lebih cepat daripada sektor riil karena memberikan keuntungan yang lebih cepat.³

Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan Moneter Islam merupakan strategi pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Sektor perbankan syariah menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Hal ini bertujuan untuk

² Eva Misfah Bayuni & Popon Srisusilawati, Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vo. 2 No. 1, 2018, hlm 21."

³ Ahmad Fuad, *Kebijakan Moneter Islam*, *Jurnal Syariah* vol 8, No. 1, 2020 hlm 3"

mengatasi krisis ekonomi yang masih berkelanjutan di Indonesia. Sektor moneter syariah sangat terkait dengan sektor riil. Selain perbaikan sektor riil, penting juga untuk mengklarifikasi kesalahpahaman seputar masalah uang.⁴

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah strategi yang digunakan untuk memengaruhi kondisi perekonomian. Bank Indonesia (BI) menggunakan enam saluran dalam menerapkan kebijakan moneter, yaitu melalui uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan harapan para pelaku ekonomi. BI menggunakan enam saluran ini untuk mencapai target kebijakan moneter seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Untuk mencapai target-target tersebut, BI menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka (*open market operation*), fasilitas diskon (*discount rate*), rasio cadangan wajib (*reserve requirement ratio*), dan pendekatan moral dalam mempengaruhi keputusan ekonomi (*moral persuasion*).⁵

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan SLR digunakan untuk mendeteksi, meninjau, menganalisis dan menginterpretasikan semua penelitian yang telah ada sehubungan dengan tema yang menarik, berfokus pada isu penelitian yang spesifik dan penting. Dengan memanfaatkan tinjauan literatur, penelitian ini dapat memperkuat bukti dari studi sebelumnya dan mencakup hasil temuan dari penelitian terdahulu yang relevan, secara lebih efisien dan efektif, serta memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih terjangkau.

Dalam pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), tahap identifikasi terdiri dari mencari dan memilih literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Proses ini mencakup pemilihan sumber informasi, penggunaan kata kunci, serta evaluasi kualitas literatur untuk memastikan penambahan yang tepat dalam tinjauan literatur sistematis yang Anda lakukan.

Tahap screening dalam *Systematic Literature Review* (SLR) melibatkan evaluasi judul, abstrak, dan isi lengkap dari artikel ilmiah guna menentukan apakah literatur tersebut memenuhi kriteria inklusi. Proses ini membantu menyaring literatur sehingga yang relevan dan bermutu tinggi dapat dimasukkan dalam tinjauan literatur sistematis.

Data yang dijadikan dasar dalam jurnal ini merupakan data sekunder yang diperoleh dengan mengambil informasi dari jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Sumber data ini diperoleh dari perpustakaan yang lengkap, database online, dan referensi yang terpercaya. Tujuan penggunaan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dalam penelitian adalah untuk membandingkan kebijakan moneter Islam dan konvensional di Indonesia. Penelitian ini diantisipasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi krisis ekonomi yang masih berkelanjutan. Selain perbaikan

⁴ Nur Aini Latifa, *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Modernisasi, vol.11 no.2 2015, hlm 125"

⁵ Heri Sudarsono, *Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah Dalam Mempengaruhi Tingkat Inflasi*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 3 No. 2 2017, hlm 53"

pada sektor riil, penelitian ini juga bertujuan untuk mengoreksi beberapa kesalahpahaman yang ada terkait dengan masalah uang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Moneter Keuangan Perspektif Konvensional

Pembahasan mengenai ekonomi moneter mencakup aspek-aspek seperti peran uang dan fungsinya, lembaga yang mengeluarkan dan mengontrol uang, serta kebijakan moneter yang bertujuan untuk mendorong pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Uang dalam konteks ekonomi modern bukan hanya sebagai alat pembayaran (*medium of exchange*), satuan nilai (*unit of account*), dan tempat penyimpanan nilai (*store of value*), tetapi juga melibatkan suku bunga sebagai harga dari uang yang menjadikannya sebuah komoditas yang diperdagangkan dalam berbagai produk keuangan. Hal ini membentuk pasar tersendiri di sektor keuangan, seperti pasar uang, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar derivatif.

Di dalam struktur moneter, terdapat peran penting dari lembaga seperti bank sentral yang memiliki peran dominan dalam mengelola sektor keuangan. Bank sentral atau otoritas moneter bertanggung jawab atas penciptaan dan distribusi uang, pengaturan sistem pembayaran, serta pembentukan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan moneter yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Kebijakan moneter umumnya diimplementasikan melalui berbagai instrumen keuangan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, guna mencapai stabilitas harga dan nilai tukar yang diinginkan.

Dalam sistem keuangan konvensional yang mengoperasikan prinsip-prinsip berdasarkan suku bunga, mekanisme moneter juga didasarkan pada konsep serupa. Suku bunga memainkan peran penting dalam membuat uang menjadi sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan. Dampaknya adalah terbentuknya pasar tersendiri untuk uang, dipengaruhi oleh jenis produk keuangan yang diperdagangkan di dalamnya, seperti pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Sebagai hasilnya, sektor keuangan menjadi terpisah dari sektor riil yang terdiri dari pasar barang-jasa dan pasar tenaga kerja. Penggunaan suku bunga dan praktik spekulasi membuka kemungkinan bagi sektor keuangan untuk beroperasi secara independen dari sektor riil, suatu kondisi yang dikenal sebagai "*decoupling*". Bahkan, terdapat situasi di mana jumlah uang yang beredar di sektor keuangan dan sektor riil dapat sangat tidak seimbang. Jumlah uang yang beredar seakan menjadi pisau bermata dua, di mana jumlah yang berlebihan cenderung menyebabkan inflasi, sementara jumlah yang terlalu sedikit dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi ini, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga agar jumlah uang yang beredar tidak mengganggu stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.⁶

B. Sistem Moneter Keuangan Perspektif Islam

Kebijakan moneter bertujuan mengatur kondisi makroekonomi agar berjalan sesuai yang diharapkan dengan mengontrol jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Dalam konteks keuangan Islam, larangan terhadap riba dan bunga bank sangat tegas. Larangan ini menghilangkan bunga bank, sebuah instrumen manajemen

⁶ Solikin M.Juhro, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, (Depok : PT.Raja Grafindo Persada, 2020) hlm 1-3.

keuangan yang sangat vital dalam ekonomi kapitalis. Manajemen keuangan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Selain itu, prinsip-prinsip lain dari kebijakan moneter yang sehat mencakup mempertimbangkan kebijakan ekonomi nasional dalam kerangka kebijakan moneter serta koordinasi dengan kebijakan makroekonomi lainnya. Konsistensi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik mencakup kejelasan tujuan, konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Ekonomi Islam tidak mengadopsi sistem suku bunga, sehingga bank sentral tak dapat menerapkan kebijakan diskonto. Bank sentral negara-negara Islam membutuhkan alat keuangan tanpa bunga untuk mengatur kebijakan ekonomi dan keuangan. Ada beberapa alat keuangan bebas bunga yang dapat dipakai oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Penghapusan sistem suku bunga tak menghalangi kontrol terhadap jumlah uang dalam perekonomian. Tujuannya adalah menjaga stabilitas gizi, mengendalikan inflasi, dan menyeimbangkan pertumbuhan atau produksi. Sebab hampir semua sektor ekonomi berhubungan, sektor keuangan berkembang lebih cepat daripada sektor riil. Keselarasan antara sektor keuangan memengaruhi semua sektor dalam perekonomian. Peningkatan kredit yang disalurkan oleh bank syariah berdampak pada keseimbangan ekonomi dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.⁷

Perkembangan cepat sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi semakin jelas. Ini tercermin dari perkembangan produk keuangan syariah yang sejalan dengan peningkatan kinerja perbankan syariah dan kepercayaan yang meningkat dari masyarakat terhadap perbankan berbasis syariah.

C. Ekonomi Moneter Islam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Sebagai salah satu bagian dari bidang ekonomi Islam, ekonomi moneter Islam memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan suatu negara. Ini terbukti saat krisis moneter 1997/1998 terjadi, di mana bank syariah tetap stabil dibandingkan dengan bank konvensional yang terkena dampak krisis. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ada argumen yang mendukung hal ini. Argumen pertama menyatakan bahwa bank syariah lebih stabil karena menggunakan kontrak *profit and loss sharing* (PLS) dalam sistem keuangannya, yang berperan sebagai penyangga keuangan untuk menyerap dampak guncangan pada aset kontrak PLS. Argumen lainnya menyatakan bahwa bank syariah harus memiliki kualitas aset yang lebih baik daripada bank konvensional karena dua alasan.

Bank syariah tidak memerlukan jaminan dari pengusaha dalam kontrak PLS untuk mengurangi risiko kredit. Kedua, dalam kontrak berbasis hutang, bank syariah tidak bisa menjual atau transfer risiko kepada pihak ketiga karena larangan penjualan hutang dalam prinsip keuangan Islam. Hal ini mendorong sebagian umat untuk kembali ke prinsip ekonomi berlandaskan Islam. Akibat dari dua pembatasan ini, bank harus menanggung sejumlah risiko terkait transaksi dan menjadi termotivasi untuk mengevaluasi risiko dengan hati-hati serta mengurangi transaksi yang tidak perlu. Kontrak hutang harus berasal dari perdagangan asli yang memiliki tujuan memberi dan menerima penyerahan. Praktik ini menghubungkan operasi bank syariah dengan ekonomi riil, mengurangi tingkat leverage, dan mencegah eksposur terhadap perdagangan derivatif dan spekulatif yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan.

⁷ Anisa Mawaddah Nasution dan Maryam Batubara, *Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia*, Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi, vol.7 no.1 2023, hlm 15”

Argumen terakhir berkaitan dengan cara pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dilaksanakan, serta bagaimana prinsip-prinsip keuangan syariah diikuti secara ketat oleh manajemen perbankan di setiap level. Mulai dari sumber daya manusia di dalam institusi keuangan, proses ini meluas ke beberapa organisasi yang menetapkan standar eksternal. Sistem pengawasan multilevel ini disebut dapat meningkatkan regulasi lembaga keuangan Islam dan sebagai hasilnya, menjadikannya lebih stabil, karena pengawasan yang kurang ketat dianggap sebagai penyebab utama kegagalan lembaga keuangan.⁸

Konteks keuangan Islam, sektor moneter cenderung dipahami sebagai area di mana bank sentral memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan yang berbeda untuk menggalakkan aktivitas ekonomi. Di sini, monetisasi melibatkan pengadaan uang sebagai sarana transaksi ekonomi dan juga menyediakan sumber daya keuangan yang tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Karena tidak ada riba, otoritas moneter tidak mengatur jumlah uang yang beredar melalui alat suku bunga untuk menjaga stabilitas harga.

Menurut logika ekonomi Islam, harga di pasar berasal dari interaksi antara penawaran dan permintaan barang. Inflasi, sebagai masalah ekonomi yang perlu diatasi, muncul akibat kurangnya pasokan. Jika kita mengasumsikan bahwa setiap permintaan mencerminkan kebutuhan masyarakat, maka perekonomian akan mampu menyediakan barang dan jasa yang cukup untuk menjaga harga tetap stabil. Oleh karena itu, kegiatan moneter dapat mendukung sektor penawaran dengan mengalihkan dana yang tidak produktif ke sektor barang dan jasa. Dengan memastikan stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi akan didorong, yang pada akhirnya akan memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan di tingkat nasional.⁹

D. Ekonomi Moneter Konvensional Menjaga Stabilitas Ekonomi

Pasal (1) ayat 10 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengatur bahwa Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan menerapkan kebijakan tertentu. Dalam sistem ekonomi konvensional, berbagai faktor seperti sistem riba, uang fiat, cadangan fraksional, praktik perbankan, dan izin spekulasi mempengaruhi penciptaan dan penarikan mencari keuntungan tanpa risiko melalui investasi di sektor moneter. Hal ini menyebabkan sebagian besar dana Investasi yang seharusnya dilakukan di sektor moneter untuk memperoleh keuntungan tanpa risiko digunakan di Mengalokasikan investasi ke sektor riil untuk tujuan produktif dan beralih ke sektor moneter, bahkan merugikan pertumbuhan sektor riil. Pembuatan uang tanpa menambah nilai akan mengakibatkan inflasi, yang pada akhirnya menjadi penghalang terhadap tujuan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dalam tata kelola ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip seperti zakat, bagi hasil, dan larangan spekulasi, akan mendorong arus Investasi yang mudah mengalir ke sektor nyata dengan tujuan yang sepenuhnya menghasilkan. Ini akan memastikan distribusi harta dan pemasukan. serta meningkatkan sektor riil. Dengan peningkatan produktivitas dan peluang pekerjaan sehingga pertumbuhan ekonomi didorong, dan Kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Perbankan

⁸ Kayed Hasan Kabir, *The global financial crisis and Islamic finance*, jurnal *Thunderbird International Business Review*, Arizona State University vol 53 no 5”

⁹ Yenny Kornitasari, Asfi Manzilati dan Munawar Ismail, *Pengantar Ekonomi Moneter Islam*, (Malang: UB Press, 2023) hlm 9-11.

syariah, meskipun masih tergolong baru jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian Indonesia dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengadopsi sistem bagi hasilnya untuk menghadapi inflasi.¹⁰

Hal ini tercapai melalui upaya seperti mengontrol jumlah mata uang yang beredar atau menyesuaikan tingkat suku bunga. Dalam jangka panjang, mengendalikan tingkat inflasi menjadi opsi yang relevan karena fokus utama dari kebijakan moneter adalah mempertahankan stabilitas nilai rupiah yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini hanya memiliki dampak terhadap kenaikan harga (inflasi) dan tidak secara signifikan memengaruhi pertumbuhan output (ekonomi). Dikarenakan keterkaitan Hubungan yang kuat antara jumlah uang yang beredar dan inflasi, hubungan antara pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan pertumbuhan output (PDB) hampir tidak ada. Ini menandakan bahwa kebijakan moneter berdampak besar dalam hal perubahan harga (inflasi) dan memiliki sedikit pengaruh pada pertumbuhan PDB. Menurut Sugiyanto dan Ety Stabil, Kebijakan moneter bisa dibagi menjadi dua jenis:

a) Kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*)

Kebijakan Moneter Ekspansif Yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar guna mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi resesi atau depresi. Kebijakan ini juga disebut sebagai kebijakan pelonggaran moneter atau kebijakan moneter akomodatif.

b) Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*)

Kebijakan Moneter bersifat kontrak yang bertujuan mengurangi jumlah uang beredar saat ekonomi mengalami inflasi. Kebijakan ini diakui sebagai kebijakan pengetatan moneter.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan moneter, baik dalam konteks Islam maupun konvensional, dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan penafsiran yang digunakan. Secara garis besar, kebijakan moneter dalam Islam menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sementara kebijakan moneter konvensional lebih menitikberatkan pada instrumen yang umumnya digunakan dalam ekonomi konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara Maryam dan Anisa Mawaddah Nasution (2023), *Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia*, Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi.
- Fuad Ahmad (2020), *Kebijakan Moneter Islam*, Jurnal Syariah

¹⁰ Suaidi, *Studi Perbandingan Sistem Moneter Keuangan Syari'ah dengan Sistem Konvensional*, Jurnal Ilmiah Multidisplin, Vol.2 No.6, 2023, hlm 2"

- Latifah Aini Nur (2015), *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Modernisasi.
- M.Juhro Solikin (2020), *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, Depok : PT.Raja Grafindo Persada
- Kayed Rasem Hassan Kabir, *The global financial crisis and Islamic finance*, jurnal *Thunderbird International Business Review*, Arizona State University vol 53 no 5
- Popon Srisusilawati dan Eva Misfah Bayuni (2018), *Kontribusi Instrument Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Solikin dan Perry Warijoyo (2017), *Kebijakan Moneter diIndonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Suaidi (2023), *Studi Perbandingan Sistem Moneter Keuangan Syari'ah dengan Sistem Konvensional*, Jurnal Ilmiah Multidisplin.
- Sudarsono Heri (2017), *Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah Dalam Mempengaruhi Tingkat Inflasi*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.
- Suryani Melva dan Lusiana (2014), *Metode SLR Untuk Mengidentifikasi Isu-Isu dalam Software Engineering*, Jurnal Sains dan Teknologi.
- Yenny Kornitasari,dkk (2023), *Pengantar Ekonomi Moneter Islam*, Malang : UB Press.